

BAB I

PENDAHULUAN

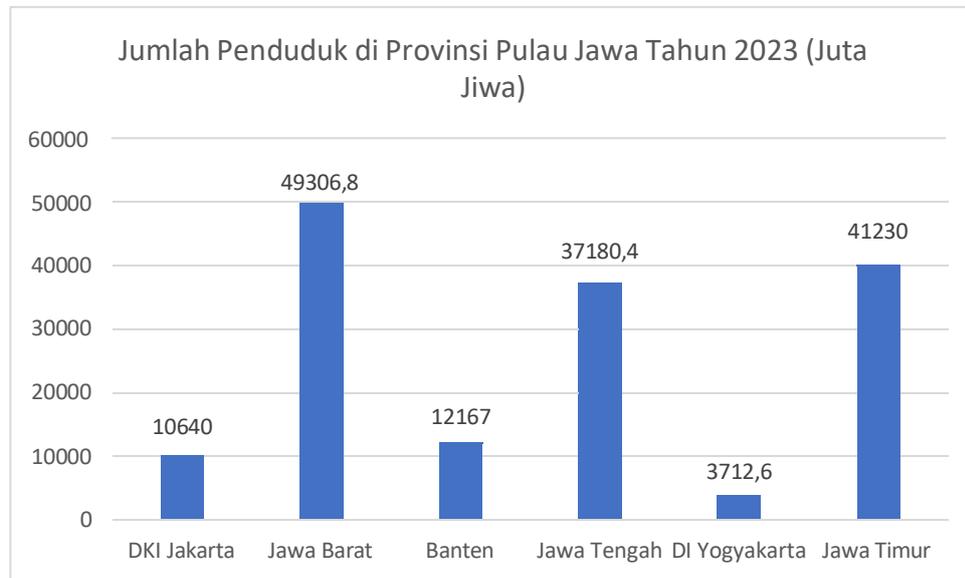
1.1 Latar Belakang

Komponen utama yang membentuk pembangunan ekonomi suatu negara yang maju adalah populasi dan sumber daya manusia nya. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil masih menjadi tantangan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia, adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. (Setiawati & Imamah, 2024). Salah satu masalah dihadapkan dalam pembangunan ekonomi adalah persoalan ketenagakerjaan. Sumber daya manusia menjadi bagian penting dari modal untuk kegiatan ekonomi khususnya pada proses pembuatan barang atau jasa. Tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi berperan sebagai sebagai faktor produksi guna berkontribusi pada pendapatan nasional (Alisyia et al., 2024). Hal tersebut selaras dengan gagasan yang dikembangkan oleh Adam Smith tentang penduduk dalam sebuah negara menjadi faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut (Saragih, 2022). Fenomena peningkatan pada angka populasi berkontribusi pada mendorong suatu negara untuk meningkatkan produktivitasnya pada tenaga kerja.

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja merujuk pada tiap individu berkemampuan melakukan aktivitas produktif untuk menghasilkan produk maupun layanan. Jumlah penduduk di Indonesia dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan tahun 2023 mencapai 278.696,2 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas atau lebih) pada tahun 2023 mencapai sebanyak 212.587 juta jiwa. Data tersebut menunjukkan adanya

penduduk usia produktif mencapai 76% total penduduk yang ada di Indonesia. Perkembangan jumlah penduduk tersebut mengindikasikan bahwa memiliki dampak terhadap pertumbuhan demografis pada segmen masyarakat yang telah memasuki rentang usia produktif. Proporsi penduduk usia produktif yang besar ini merupakan potensi besar bagi pembangunan ekonomi, namun juga menjadi tantangan jika tidak diikuti oleh penciptaan lapangan kerja yang memadai. Dengan adanya populasi dengan usia produktif tinggi namun tidak diikuti dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dapat menciptakan pengangguran (Adriyanto et al., 2020). Salah satu indikator kritis dalam menilai keterlibatan penduduk pada aspek ekonomi, dengan parameter ini menggambarkan persentase dari kelompok usia produktif yang berperan aktif dalam aktivitas perekonomian.. TPAK memegang peran penting dalam menentukan kelangsungan dan kemajuan suatu wilayah.

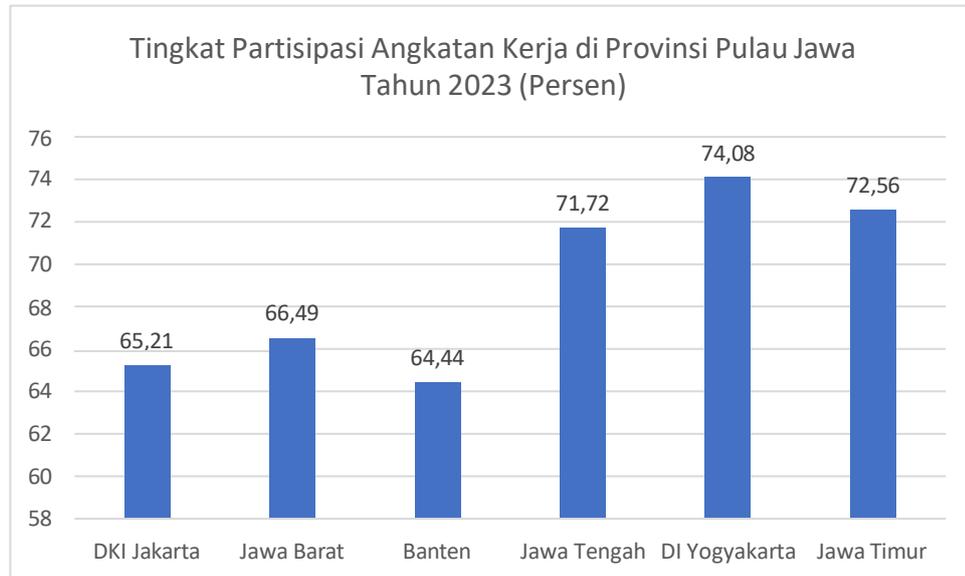
Pada tahun 2023, jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 41,23 juta jiwa (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024). Kepadatan populasi tersebut menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya manusia (SDM), sekaligus menghadapi tantangan besar untuk mengembangkan kesempatan pekerjaan yang cukup guna mengakomodasi pertumbuhan untuk tenaga produktif. Dengan demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berfungsi sebagai tolak ukur untuk memahami dinamika ketenagakerjaan di Jawa Timur dan upaya mengoptimalkan potensi SDM yang dimiliki.

Grafik 1. 1 Jumlah Penduduk di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 (data diolah)

Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebesar 41.230 juta jiwa diantara enam provinsi di Pulau Jawa. Kemudian Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan ketiga dengan penduduk tercatat 37.180,4 juta jiwa, Provinsi Banten peringkat kelima memiliki jumlah penduduk 12.167 juta jiwa, lalu Provinsi DKI Jakarta dengan penduduk sebesar 10.640 juta jiwa, disusul Provinsi yang terakhir Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 3.712,6 juta jiwa. Dengan menduduki posisi kedua populasi penduduk yang tinggi, menyebabkan Provinsi Jawa Timur memiliki dinamika kependudukan dengan populasi usia produktif yang banyak sehingga berpotensi besar dalam menyumbang angkatan kerja.

Grafik 1. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 (data diolah)

Jawa Timur merupakan wilayah terpadat di Pulau Jawa, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi kedua (72,56%) untuk tahun 2023, di bawah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (74,08%), menurut grafik statistik di atas. Diikuti Provinsi Jawa Tengah peringkat ketiga sebesar 71,72% lalu posisi keempat Provinsi Jawa Barat sebesar 66,49%, Provinsi DKI Jakarta dengan peringkat kelima sebanyak 65,21%, kemudian Provinsi Banten menduduki peringkat terakhir TPAK rendah dengan perolehan sebesar 64,44%. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah sebuah indikator agar mengetahui besar persentase penduduk dengan usia produktif yang aktif sedang mencari pekerjaan serta jumlah individu yang sedang bekerja. Provinsi Jawa Timur dengan tingkat partisipasi tinggi kedua setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif di wilayah tersebut tinggi sehingga berpotensi pada peningkatan angka partisipasi angkatan kerja. Kondisi ini menunjukkan situasi kuantitas angkatan kerja akan meningkat seiring dengan besarnya populasi penduduk usia produktif. Selain itu,

partisipasi angkatan kerja akan menurun jika tingkat pendidikan penduduk suatu negara rendah, sebab saat ini dunia kerja mensyaratkan pendidikan sebagai salah satu kualifikasi utama (Disnaker Kabupaten Buleleng, 2019).

Banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan tingkat pendidikan menjadi masalah kompleks dalam kondisi tenaga kerja di Indonesia khususnya wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disebabkan adanya kualitas SDM rendah sehingga kurang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dikarenakan beberapa faktor salah satunya tidak didukung dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan oleh sebuah instansi atau perusahaan. Selain itu peran pendidikan juga sangat mempengaruhi dalam membentuk produktivitas tenaga kerja yang berkualitas untuk memenuhi kualifikasi perusahaan (Atutuli et al., 2019).

Grafik 1. 3 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA/SMK di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/SMK di Provinsi Jawa Timur berada di peringkat keempat

setelah Provinsi DIY, DKI Jakarta dan Banten. Setelah Provinsi Jawa Timur disusul Provinsi Jawa Barat di urutan kelima, Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan terakhir. Masalah penyelesaian tingkat pendidikan yang terbilang masih rendah dengan populasi penduduk provinsi terbesar kedua se-Pulau Jawa pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebab dengan kualitas pendidikan dapat menentukan kualitas tenaga kerja wilayah tersebut. Masalah ini menjadi tantangan Provinsi Jawa Timur dengan masih rendahnya kualitas tenaga kerja di Jawa Timur (BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, 2023).

TPAK digambarkan melalui perbandingan populasi yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk dalam rentang usia produktif (Ningrum et al., 2022). Sehingga dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif, hal tersebut dapat mendorong peningkatan jumlah individu yang tergolong dalam angkatan kerja sehingga dapat berpartisipasi dalam melakukan produksi guna menaikkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Grafik 1. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023 (data diolah)

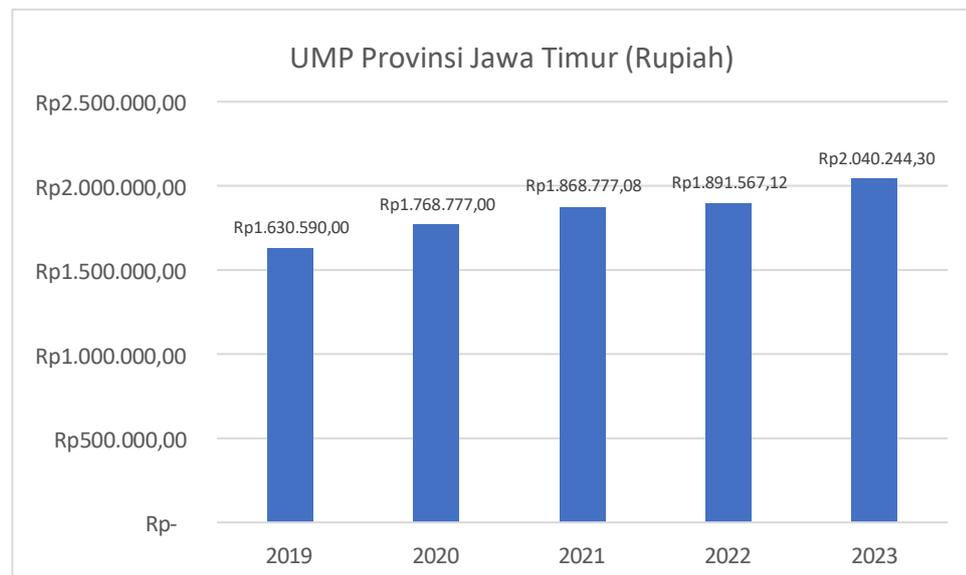
Menurut Grafik 1.4, TPAK di Provinsi Jawa Timur adalah 69,61% pada tahun 2019. Angka ini naik menjadi 70,33% pada 2019, turun sebesar 70% pada 2020, dan kemudian naik lagi menjadi 71,23% pada 2021. Lalu pada tahun 2022 memperoleh kenaikan menjadi sebesar 72,56% yang menunjukkan bahwa tahun tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 72,56%. Dari data tersebut, menggambarkan bahwa pada Provinsi Jawa Timur TPAK relatif fluktuatif beberapa tahun terakhir. Situasi tersebut terlihat pada tahun 2019 dengan tingkat paling drastis, kemudian disusul peningkatan di tahun berikutnya yaitu tahun 2020, lalu tahun berikutnya 2021 kembali mengalami penurunan.

TPAK pada Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan penurunan, kondisi ini dapat muncul akibat rendahnya populasi penduduk dengan usia produktif, serta peningkatan jumlah penduduk usia produktif tidak diimbangi oleh tersedianya kesempatan kerja. Penurunan TPAK juga dapat diakibatkan oleh adanya tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang menurun dalam angkatan kerja sebab perbaikan fasilitas dan kondisi pendidikan yang lebih berkualitas. TPAK pada suatu daerah dapat disebabkan faktor-faktor yang ada pada wilayah tersebut, baik dalam faktor demografi, sosial, maupun faktor ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2023). Oleh karena itu, TPAK dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah.

Satu dari sekian faktor yang dapat mempengaruhi TPAK yaitu upah, sebab upah menjadi faktor penentu produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan produk dan jasa pada sebuah perusahaan termasuk mereka yang memiliki pendidikan serta

keterampilan yang tinggi. Tingginya permintaan serta penawaran dalam pasar tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh faktor upah yang ditetapkan (Pradnyaswari et al., 2021). Penawaran upah yang tinggi menghasilkan masyarakat yang terdorong untuk mencari pekerjaan. Dengan kata lain, upah yang kompetitif dapat menarik lebih banyak individu agar berpartisipasi dalam angkatan kerja. Selain itu, upah yang tinggi juga meningkatkan motivasi dan kepuasan kinerja sehingga ketika tenaga kerja merasakan upah yang setara dengan usaha yang dilakukan, maka mereka cenderung akan berusaha lebih keras dalam menghasilkan produk dan jasa. Struktur upah yang tersedia sangat mempengaruhi TPAK dengan upah yang lebih tinggi dapat cenderung menarik individu dengan kualifikasi dan keterampilan yang baik. Namun, dengan upah yang rendah dapat mengakibatkan tingkat kepuasan kerja yang rendah, yang berpotensi meningkatkan angka pengunduran diri yang pada akhirnya mengurangi produktivitas secara keseluruhan.

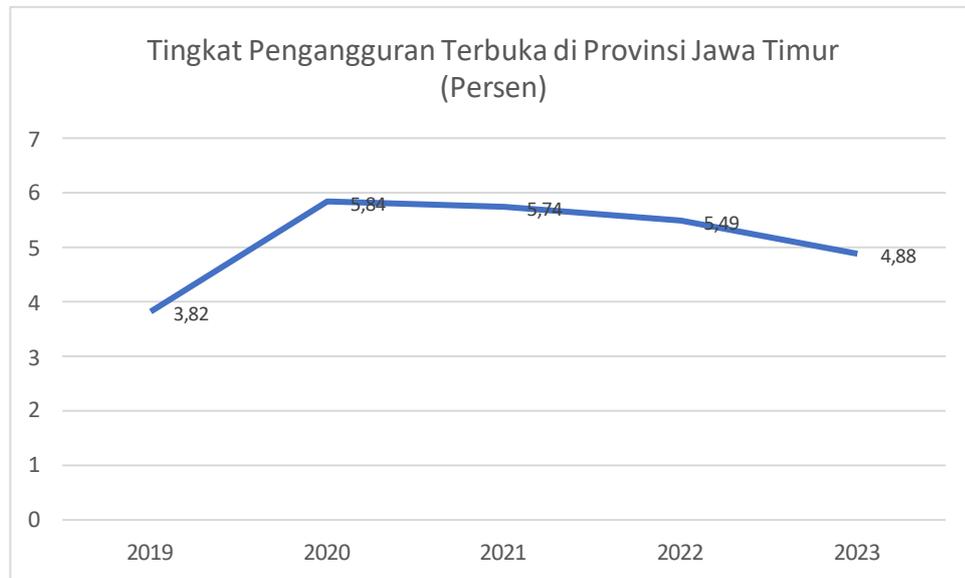
Grafik 1. 5 Upah Minimum Provinsi di Provinsi Jawa Timur



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (data diolah)

Grafik di atas menunjukkan pada tahun 2019 upah minimum Provinsi Jawa Timur ada di angka Rp1.630.590 lalu tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1.768.777, kemudian tahun 2021 sebesar Rp1.868.777, tahun 2022 sebesar Rp1.891.567,12 disusul kenaikan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp2.040.244,30. Selama data lima tahun terakhir tersebut upah minimum di Provinsi Jawa Timur cenderung menunjukkan tren kenaikan. Upah minimum yang terus meningkat tersebut merupakan langkah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mensejahterakan masyarakat melalui tenaga kerja yang diharapkan dapat menaikkan daya beli penduduk untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Selain itu, kenaikan upah minimum diharapkan menarik penduduk usia produktif untuk turut aktif menciptakan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Apabila upah minimum ditetapkan tidak seimbang dengan peningkatan produktivitas, hal tersebut dapat menimbulkan resiko bagi kelangsungan usaha serta lapangan kerja di masa depan.

Selain upah minimum, TPAK juga dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka sebab tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan tidak sesuainya antara *skill* yang dimiliki angkatan kerja dan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja (Marliyani, 2024). Apabila tingkat pengangguran rendah, maka artinya lebih banyak peluang kerja tersedia yang dapat mendorong individu untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Pengangguran diartikan sebagai masalah ekonomi yang dapat mempengaruhi individu secara langsung (Fajri & Iriani, 2022).

Grafik 1. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023 (data diolah)

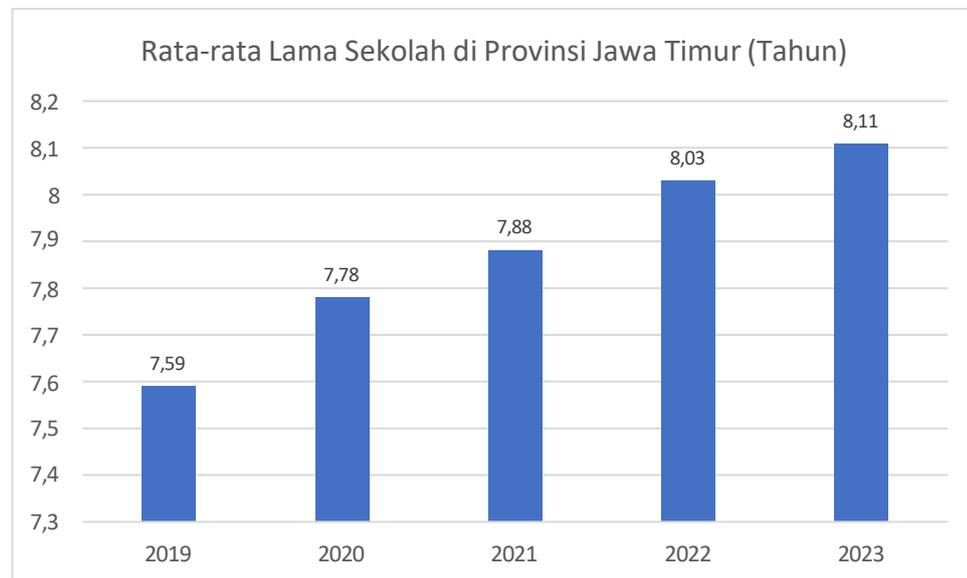
Berdasarkan Grafik 1.6, TPT Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2023 memiliki kecenderungan terbesar untuk naik di tahun 2020 sebesar 5,84%, kemudian turun 0,10% di tahun 2021 menjadi 5,74%. Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan kembali, untuk tahun 2022 sebesar 5,49% lalu tahun 2023 sebesar 4,58%. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa TPT di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2019 – 2023 masih cenderung belum stabil. Sebab meskipun pada tiga tahun terakhir 2021, 2022 dan 2023 menunjukkan penurunan, akan tetapi dilihat dari tingkat pendidikan, Provinsi Jawa Timur masih menghadapi permasalahan ketenagakerjaan dengan banyaknya lulusan SMA/SMK yang menyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Timur, dari data BPS Jawa Timur tahun 2023 yaitu sebesar 8,70% untuk lulusan SMK lalu disusul dengan lulusan SMA yang menyumbang pengangguran 7,93%. Hal tersebut merepresentasikan kondisi bahwa usia produktif lulusan SMK/SMA di Provinsi Jawa Timur banyak yang belum terserap pada pasar tenaga kerja.

Tingginya TPT dalam sebuah wilayah terjadi sebab wilayah tersebut tidak menyediakan lapangan pekerjaan (Ashari & Iriani, 2024). Masalah ketenagakerjaan seperti pengangguran menjadi masalah yang kompleks, diantaranya disebabkan oleh banyaknya lulusan yang belum memenuhi dengan kriteria pasar tenaga kerja yang diharapkan oleh instansi formal maupun perusahaan swasta. Banyak lulusan yang memasuki pasar kerja tanpa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan, sehingga mereka tidak memenuhi tuntutan industri. Meskipun penawaran sumber daya manusia tersedia banyak di pasar tenaga kerja, apabila lulusan tersebut tidak sesuai kriteria dengan kebutuhan perusahaan, maka tingkat pengangguran akan tetap tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha untuk membentuk lulusan-lulusan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan (Junaidi & Rahayu, 2023).

Melalui tingkat pendidikan yang ditempuh, dapat mengakibatkan seseorang berperan aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai produsen atau tenaga kerja. Teori *human capital* menyebutkan bahwa pendidikan menjadi alat investasi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam menentukan kinerja individu, sebab pengetahuan yang diperoleh akan menghasilkan keterampilan dan pelatihan yang disiapkan untuk masa yang akan datang (Khojin et al., 2020). Oleh sebab itu, individu tingkat pendidikan yang tinggi dapat berkualitas lebih baik dalam hal keterampilan dan pengetahuan. Hal ini akan berdampak pada seseorang tersebut dapat beradaptasi bersama perkembangan teknologi serta keinginan pasar kerja sehingga memiliki upah yang cenderung lebih tinggi sebab seseorang diimbangi tingginya pendidikan

yang ditempuh, maka individu tersebut memiliki nilai waktu yang cenderung mahal dan berharga.

Grafik 1. 7 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Timur



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023 (data diolah)

Grafik 1.7 menunjukkan tren naik dalam RLS di Jawa Timur dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 penduduk dengan lulusan pendidikan tertinggi dicapai pada tahun 2023 dengan 8,11 tahun. Lalu diikuti dengan lulusan tahun 2022 sebanyak 8,03 tahun, tahun 2021 sebanyak 7,88 tahun, tahun 2020 sebanyak 7,78 tahun, kemudian tahun 2019 dengan lulusan 7,59 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk dalam mengenyam pendidikan tergolong masih rendah sebab dalam UU No. 20 Tahun 2001 membahas Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan setiap penduduk di Indonesia ditetapkan wajib belajar selama 12 tahun. Dengan pengembangan pengetahuan individu pada tingkat pendidikan lebih tinggi dan lama dalam mengenyam pendidikan maka akan berdampak pada perolehan pekerjaan yang lebih baik daripada pendidikan rendah (Novlitha & Hasan, 2023). Hal tersebut memberikan dampak terhadap kurangnya

kualitas lulusan dalam bersaing pada pasar kerja yang semakin ketat karena dengan tingginya pendidikan yang di tempuh individu dapat menambah tingkat partisipasi angkatan kerja wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, TPAK di Provinsi Jawa Timur, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-rata Lama Sekolah, menjadi topik utama pembahasan dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak dari faktor tersebut sebagai elemen krusial dalam TPAK, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini akan diberi judul **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas, representasi beberapa isu atau persoalan dapat dirumsukan untuk menjadi fokus kajian ini sebagai berikut:

1. Apakah Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh dari Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini disusun dengan menggunakan kuantitatif dan penggunaan data sekunder pada Provinsi Jawa Timur. Data yang diperoleh melalui *website* milik BPS Jawa Timur. Untuk menelaah pengaruh dari faktor Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap TPAK di Provinsi Jawa Timur dalam periode 2009 – 2023 menjadi ruang lingkup pada penelitian ini..

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang dinamika tenaga kerja di wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Manfaat praktisi, dapat menyumbang sumber referensi pada beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi Peneliti, bahwa penelitian ini menerapkan teori yang didapatkan peneliti selama masa studi ke dalam situasi yang nyata.
- b. Bagi Pemerintah atau Pengambil Kebijakan, dapat memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah Provinsi Jatim untuk menentukan rumusan kebijakan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan atau ekonomi daerah.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, memberikan referensi atau titik awal peneliti lain serta pembaca yang ingin melanjutkan dan memperdalam penelitian selanjutnya dengan studi pada bidang sama untuk bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.